

## Principles of Politics in Islam Based on the Qur'an and Their Application During the Caliphate Era

Lulu Nurul Ambiya<sup>1</sup>, Ilham Nur Rohman<sup>2</sup>, Muhammad Mufti Najmul Umam Assondani<sup>3</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam Riyadul 'Ulum, Tasikmalaya

[lulunurulambiya010703@gmail.com](mailto:lulunurulambiya010703@gmail.com)<sup>1</sup>, [ilhamnur0109@gmail.com](mailto:ilhamnur0109@gmail.com)<sup>2</sup>, [muftinajmul19@gmail.com](mailto:muftinajmul19@gmail.com)<sup>3</sup>

Diserahkan tanggal 09 Januari 2025 | Diterima tanggal 09 Januari 2025 | Diterbitkan tanggal 31 Januari 2025

### Abstract:

*This research examines the political principles of Islam based on the teachings of the Qur'an and their application during the reign of the Khulafaur Rashidin. Values such as justice, deliberation, equality before the law and social welfare are the main pillars of the Islamic political system. The article also reviews the implementation of politics by the four caliphs, namely Abu Bakar, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, and Ali bin Abi Talib, highlighting the successes, challenges, and policies they implemented in leading the people. This study confirms that politics in Islam is not only centred on power, but also prioritises the implementation of sharia, the creation of peace, and the improvement of people's welfare.*

**Keywords:** *Islamic Politics, Quran, Khulafaur Rashidin, Justice, Deliberation*

### Abstrak :

*Penelitian ini mengkaji prinsip-prinsip politik dalam Islam yang berlandaskan ajaran Al-Qur'an serta penerapannya selama masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Nilai-nilai seperti keadilan, musyawarah, kesetaraan di hadapan hukum, dan kesejahteraan sosial menjadi pilar utama dalam sistem politik Islam. Artikel ini juga mengulas pelaksanaan politik oleh empat khalifah, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, dengan menyoroti keberhasilan, tantangan, serta kebijakan yang mereka terapkan dalam memimpin umat. Kajian ini menegaskan bahwa politik dalam Islam tidak hanya berpusat pada kekuasaan, tetapi juga mengutamakan pelaksanaan syariat, penciptaan perdamaian, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.*

**Kata Kunci:** *Politik Islam, Al-Quran, Khulafaur Rasyidin, Keadilan, Musyawarah*

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



## PENDAHULUAN

Perkembangan dunia modern saat ini ditandai dengan salah satunya meningkatnya kompleksitas terhadap politik zaman modern. Negara dengan penduduk mayoritas muslim menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam politik sehingga melahirkan keadilan, kesejahteraan

dalam berdasarkan politik yang mengacu pada prinsip nilai Islam, mengingat prinsip tersebut sudah dilaksanakan sejak dulu. Sehingga di dalam Islam tidak ada kekosongan hukum pada saat ini dan sebelumnya (Syahrin & Zulpan, 2020).

Politik merupakan upaya untuk menghimpun kekuatan, meningkatkan kualitas dan kuantitas kekuatan, mengawasi dan mengendalikan kekuatan, serta memanfaatkannya guna mencapai tujuan kekuasaan dalam negara maupun institusi lainnya. Dalam konteks Islam, politik dikenal dengan istilah siyasah, yang memiliki makna mendalam dalam tradisi keilmuan Islam. Istilah ini berakar dari kata kerja *sâsa* (*yasûsu*), yang dalam ungkapan "*sasa addawaba yasusuha siyasatan*" berarti mengurus, melatih, dan mendidik. Dalam pengertian yang lebih luas, siyasah merujuk pada pengaturan, pengendalian, pengelolaan, pengambilan keputusan, hingga kepemimpinan terhadap suatu komunitas atau bangsa. Konsep ini kemudian berkembang menjadi siyasah syar'iyah, yaitu politik yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan (Adolph, 2016).

Konsep dasar dalam Islam berdasarkan Al-qur'an dan sunah, salah satu dalam al-quran terdapat dalam surat al maidah ayat 8 yaitu perintah kepada orang-orang yang beriman terhadap berperillaku adil, jujur, dan ikhlas. Bersikap adil dan jujur adalah kunci sukses untuk mencapai ketatanegaraan dalam berpolitik, jejak tersebut salah satunya adalah khalifah rasyidin, khulafaur rasyidin merupakan sebutan kepada para pemimpin umat Islam yang menggantikan nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat, mereka Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, kepemimpinan mereka dikenal dengan keadilan, kebijaksanaan dan komitmen dalam menegakkan syariat Islam, sebagai kepala negara mengatur kepemimpinan dan kehidupan sosial masyarakat agar terciptanya kedamaian, keadilan serta kemakmuran, sebagai pemimpin agama melaksanakan dan memutuskan keputusan berdasarkan Islam jika terjadi perselisihan pendapat, setiap kebijakan dan mengambil keputusan diambil berdasarkan keputusan. Tugas Nabi Muhammad SAW tidak dapat diganti, karena merupakan nabi dan rasul yang terakhir, setelah pasca meninggal digantikan Khulafaur Rasyidin sebagai kepala negara, ada dua cara dalam pemilihan yaitu dilakukan dengan musyawarah oleh sahabat nabi yang kedua dilakukan berdasarkan penunjukan khalifah sebelumnya. Nama "Khulafaur Rasyidin" yang terdiri dari dua kata yaitu "al-Khuafa" bentuk jama dari "khalifah" yang berarti "pengganti" dan "ar-rasyidin" berarti "benar, bijaksana, pintar". Maka apabila digabungkan Khulafaur Rasyidin ialah para pemimpin pengganti Rasulullah SAW yang arif dan bijaksana. (Fakhrul & Barmin, n.d.)

Maka berdasarkan uraian pembahasan tersebut, bagaimana pelaksanaan prinsip politik setelah nabi Muhammad SAW meninggal yang dilaksanakan oleh sahabat nabi yang menjadi pemimpin dalam menjalankan tugas dan perintah sesuai dengan prinsip ajaran agama Islam.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan komparatif untuk menganalisis sistem pemerintahan Islam dan demokrasi modern. Metode kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk memahami dan menggali secara mendalam prinsip-prinsip dasar, struktur pemerintahan, dan penerapan kedua sistem tersebut dalam konteks yang lebih luas,

bukan untuk menghasilkan data numerik. Dengan menggunakan pendekatan komparatif, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kesamaan dan perbedaan antara sistem pemerintahan Islam dan demokrasi modern dalam aspek-aspek tertentu seperti keadilan sosial, musyawarah, dan partisipasi publik (Sagena et al., 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yang mencakup tinjauan terhadap buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti. Data sekunder ini menjadi sumber utama untuk memahami teori-teori yang ada terkait sistem pemerintahan Islam, prinsip-prinsip demokrasi, dan aplikasi keduanya dalam pemerintahan di berbagai negara. Selain itu, serta dokumen-dokumen hukum dan konstitusi negara-negara demokratis, juga digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik dan prinsip-prinsip kedua sistem pemerintahan (Wibowo, 2021).

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan sistem pemerintahan Islam dan demokrasi modern. Analisis ini dilakukan dengan cara mengkategorikan berbagai konsep dan nilai yang ada dalam kedua sistem tersebut, untuk menemukan kesamaan, perbedaan, serta kemungkinan integrasi antara keduanya. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana kedua sistem ini dapat diterapkan dalam tata kelola pemerintahan yang lebih etis dan inklusif di dunia kontemporer (Muhajirin & others, 2018).

## PEMBAHASAN

Berbagai tokoh pemikir Islam memiliki pandangan berbeda terkait dengan konsep demokrasi, baik dalam hubungannya dengan sistem pemerintahan Islam maupun relevansinya dalam dunia modern. Yusuf al-Qardawi, seorang ulama terkemuka, berpendapat bahwa demokrasi dapat diterima dalam Islam selama prinsip-prinsip dasar syariah tetap dijunjung tinggi. Ia menganggap demokrasi sebagai sistem yang memungkinkan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, yang pada dasarnya sesuai dengan prinsip musyawarah (syura) dalam Islam. Namun, al-Qardawi menekankan bahwa demokrasi harus selalu berlandaskan pada hukum Allah, dan segala keputusan politik harus selaras dengan prinsip-prinsip moral dan agama (Pahri, 2017).

Mempunyai nilai yang tinggi dalam suatu konsep prinsip keadilan dalam politik, keadilan tidak dibuat oleh manusia, keadilan yang dihasilkan oleh manusia dengan doktrin rasa humanisme tersebut menguntungkan manusia sebagai individu menjadi titik pusat keadilan, jika konsep keadilan dalam politik Islam memposisikan kedudukan manusia yang baik, mengargai individu sebagai suatu masyarakat, titik pusat bukan pada keuntungan manusia tetapi kedudukan Allah yang diberikan kepada hambanya, maka ketika Khulafaur Rasyidin tersebut menjadi tugas dalam kepemimpinan setelah Rasulullah SAW meninggal. (Amirulkamar & Januar, n.d.)

### 1. Abu Bakar

12 Rabi'ul Awwal hari senin 8 juni 632 M, saat Rasulullah wafat, beliau tidak pernah berwasiat tentang siapa yang harus menggantikan pemimpin politik Islam setelahnya, sehingga muncul permasalahan siapa yang akan melanjutkan, hasil musyawarah terdapat tiga pandangan,

yaitu pertama sahabat Anshar dikarenakan membantu nabi Muhammad SAW untuk mempertahankan iman serta jiwa dan hartanya dikarenakan jabatan khalifah berhak dimiliki mereka. Kedua pandangan dari kaum muhajirin sepakat bahwa telah memberikan jasa dalam melindungi nabi Muhammad SAW, tetapi Abu Bakar tidak setuju karena bukan alasan yang cocok untuk menuntut atas jabatan, ketiga tanggapan dari al-hubab bin al-mundhir berasal dari kaum Anshar berpendapat bahwa perlu dua orang yang sama-sama berkuasa, satu golongan dari anshar dan satu dari golongan kaum muhajirin, tetapi pandangan tersebut ditolak oleh kaum anshar dan muhajirin (Zulkarnaen, 2021).

Saat peristiwa sedang berlangsung Umar bin Khattab mengusulkan Abu Bakar sebagai orang yang cocok untuk posisi tersebut, disebabkan faktor kedekatan dengan nabi Muhammad SAW dan pengalaman berdakwah bersama. Sehingga Umar membaiaat Abu Bakar yang diikuti oleh kehadiran yang mengikuti musyawarah tersebut, sehingga dilakukan secara aklamasi oleh perorangan yang disetujui oleh kaum muslimin yang hadir dalam musyawarah tersebut. (Hamzani, A. I., & Aravik, 2021)

Setelah diputusnya Abu Bakar menjadi khalifah, Abu Bakar menyampaikan pidato perdana setelah dilantik, yang disampaikan pada pidato tersebut adalah kepemimpinan jujur, adil, dan tegas, beberapa diantaranya :

**a. Sikap tawudhu;** yaitu sikap tidak memperlihatkan kelebihan atau keistimewaan yang dipunyai oleh Abu Bakar;

**b. Transparan,** sikap menerima dan terbuka terhadap masukan dan kritikan tidak ada yang ditutupi, Abu Bakar sebagai hamba Allah;

**c. Tulus dan jujur,** merupakan ajaran ditekankan dalam ajaran Islam yang mencakup kejujuran dalam perkataan dan tindakan;

**d. Komitmen dengan ajaran,** Abu Bakar berpesan agar masyarakat Islam menjalankan perintah firman Allah dan menjauhi larangan.

## 2. Umar bin Khattab

Selanjutnya masa kepemimpinan, Umar bin Khattab, yang menjabat sebagai khalifah kedua setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq, memimpin umat Islam selama sekitar 13 tahun (634–644 M). Kepemimpinannya dimulai pada 13 Agustus 634 M, dan ia memainkan peran yang sangat penting dalam kemajuan dan perkembangan Islam. Di bawah kepemimpinannya, Islam berkembang menjadi kekuatan politik yang signifikan, dengan sistem pemerintahan yang lebih solid dan birokrasi yang terorganisir dengan baik. Umar terkenal dengan kebijakannya yang berfokus pada penguatan internal umat Islam, serta memperluas pengaruh Islam ke luar dengan cara yang bijaksana. Dalam hubungan dengan masyarakat non-Muslim, Umar juga berhasil menciptakan kedamaian dan kestabilan, yang memungkinkan keberlangsungan dan perluasan wilayah Islam. Kebijakan sosial, ekonomi, dan administrasi yang diterapkannya membantu membentuk dasar-dasar negara Islam yang kuat, dan pemerintahan Umar diakui luas sebagai era yang penuh dengan keadilan dan reformasi. (Rachmayani, 2015)

Keberhasilan kepemimpinan Umar tidak hanya terbatas pada kebijakan dalam negeri, tetapi juga dalam ekspansi militer yang membawa Islam ke wilayah-wilayah baru, serta menjaga

keseimbangan antara keadilan dalam pemerintahan dan pengelolaan urusan umat Islam dengan bijaksana. Beberapa hal diantaranya:

**a. Menciptakan stabilitas politik**, di dalam pengelolaan wilayah kekuasaan yang luas, Umar bin Khattab mulai mengatur administrasi dan birokrasi pemerintahan sebagai langkah dan kebijakan yang diambilnya untuk menata politik;

**b. Menciptakan pemerintahan bersih**, yaitu mengambil keputusan melalui musyawarah dan menutup kegiatan yang menimbulkan nepotisme, serta pelaksanaan hukum;

**c. Melaksanakan administrasi pemerintahan**, yaitu dengan cara pembagian daerah kekuasaan Islam dalam beberapa wilayah yaitu gubernur, wali, dan amir untuk bisa memaksimalkan wilayah penigkatan sumber pendapatan dan stabilitas politik Islam;

**d. Menertibkan administrasi militer**, yaitu memberikan gaji kepada tentara muslimin yang disebut al-diwan dan membangun benteng di perbatasan;

**e. Pemisahan lembaga eksekutif dan yudikatif**, sistem penjara pertama kali dilakukan Umar bin Khattab sebenarnya telah ada sistem penjara sejak zaman nabi Muhammad SAW. Serta Umar yang melakukan pemisahan urusan pemerintahan dan lembaga hukum.

Umar bin Khattab wafat empat hari setelah menderita luka parah akibat serangan bertubi-tubi dengan pisau melengkung, yang mengakhiri masa pemerintahannya sebagai Khalifah atau Amirul Mukminin (Pemimpin Orang Beriman). Fairuz, seorang mantan tawanan perang Persia, bertanggung jawab atas serangan tersebut. Pada hari Sabtu, 26 Dzulhijjah, 23 H (634 M), Khalifah Umar sedang memimpin salat Subuh berjamaah di Masjid Nabawi ketika upaya pembunuhan terjadi. (Sirojuddin, 2020)

### 3. Utsman bin Affan

Miqdad mengumpulkan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf di rumah Aisyah setelah meninggalnya Umar bin Khattab. Namun Thalhah tidak menghadiri pertemuan tersebut (Mansur, 2019). Diputuskan dalam majelis bahwa Abdurrahman bin Auf akan bertugas memilih khalifah berikutnya dan menetapkan aturan-aturannya. Diputuskan juga bahwa calon harus mempertimbangkan pandangan komunitas Muslim dan bukan anggota keluarga khalifah. Abdurrahman menghabiskan tiga hari tiga malam untuk berdiskusi dengan para sahabat Nabi yang tinggal di Madinah, termasuk pemimpin militer dan tokoh penting lainnya. Di malam terakhir, ia bahkan tidak tidur, terus mendiskusikan calon pengganti Umar hingga pagi tiba. Pada hari keempat, Abdurrahman mengumpulkan kaum Muhajirin, Anshar, pemimpin prajurit, dan sahabat senior di Masjid Madinah. Di sana, ia meminta pendapat mereka. Ammar bin Yasir menyarankan agar Ali dibaiat untuk mencegah perpecahan di kalangan umat muslim. Pendapat ini didukung oleh Abdullah bin Rabi'ah, tetapi muncul perbedaan pendapat di antara yang hadir. Abdurrahman kemudian memanggil Ali dan meminta janji untuk memerintah berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, dan tradisi dua khalifah sebelumnya. Ali setuju, tetapi menekankan bahwa ia akan bertindak sesuai dengan ilmunya. Selanjutnya, Abdurrahman meminta komitmen serupa dari Utsman bin Affan, yang langsung menyatakan kesediaannya. Akhirnya, Abdurrahman mengangkat tangan Utsman dan membaiainya sebagai khalifah, diikuti oleh seluruh peserta. Proses pemilihan Utsman cukup

demokratis meskipun ada persaingan antara pendukung Ali dan pendukung Utsman. Pengangkatan khalifah melalui tim syura ini merupakan praktik baru dalam sejarah Islam. Utsman, seorang saudagar kaya yang dermawan, dikenal dengan kelembutannya, meskipun gaya kepemimpinannya dianggap kurang tegas dibandingkan pendahulunya. Dia sering mempraktikkan musyawarah dalam menghadapi persoalan, seperti saat menghadapi keresahan yang disebabkan oleh kelompok Sabaiyah. Utsman mengundang seluruh gubernur untuk berkumpul di Madinah pada tahun 34 H. Dalam pertemuan itu, disarankan agar pelaku keresahan dihukum mati, tetapi Utsman menolak. Sebagai gantinya, delegasi dikirim untuk berbicara dengan masyarakat di provinsi-provinsi. Sebagian besar utusan melaporkan situasi yang stabil, kecuali satu orang yang dikirim ke Mesir. Di sana, Ammar bin Yasir terbujuk oleh kelompok Sabaiyah dan bergabung dengan mereka. Adapun prestasi Usman bin Affan selama menjabat sebagai Khalifah yaitu:

**a. Ekspansi Wilayah Islam,**

Persia: Utsman melanjutkan ekspansi yang dimulai pada masa Umar bin Khattab dengan berhasil menguasai wilayah Persia secara sempurna.

Syam dan Mesir: Tentara Romawi berhasil diusir dari Syam dan Mesir, memastikan stabilitas wilayah yang telah ditaklukkan.

**b. Keadilan dan Kebebasan Beragama,**

Utsman dikenal menghukum kedzaliman serta menjamin kebebasan beragama dalam wilayah kekhalifahannya, menunjukkan pendekatan yang moderat dan toleran.

**c. Promosi Sosial dan Filantropi,**

Utsman mengkampanyekan semangat bakti sosial dengan memberi contoh melalui tindakan dermawannya, seperti menyumbangkan hartanya untuk kepentingan umat.

**d. Pembangunan dan Infrastruktur,**

Perluasan Masjid Nabawi: Utsman melakukan renovasi besar-besaran terhadap Masjid Nabawi untuk menampung jumlah umat Islam yang semakin banyak.

**e. Kodifikasi Al-Quran,**

Utsman memprakarsai pengkodifikasian ulang Al-Qur'an akibat banyaknya perbedaan qira'ah (cara membaca). Mushaf yang disusun dikenal sebagai Mushaf Utsmani, yang menjadi rujukan hingga saat ini.

**f. Peningkatan Pertahanan Negara,**

Utsman mendirikan angkatan laut Islam untuk menghadapi ancaman dari kekuatan maritim, terutama dari Byzantium, yang meningkatkan keamanan wilayah pesisir.

Keputusan Utsman menunjukkan sikapnya yang anti-kekerasan dan menolak tindakan sewenang-wenang. Namun, gaya kepemimpinan Utsman akhirnya menimbulkan ketidakpuasan akibat nepotisme, termasuk pengangkatan kerabat seperti Marwan bin Hakam ke posisi penting. Hal ini menyebabkan protes besar yang berujung pada pemberontakan dan pembunuhannya, peristiwa yang dikenal sebagai Al-Fitnah Al-Kubra.

#### **4. Ali bin Abi Thalib**

Umat Islam dari golongan Muhajirin dan Ansar kerap mendesak Ali bin Abi Thalib untuk mengambil alih jabatan khalifah setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Awalnya, Ali

menolak dengan alasan bahwa musyawarah (syura) harus digunakan untuk memilih khalifah. Namun, setelah banyak dibujuk oleh penduduk Madinah, yang khawatir akan terjadinya anarki lebih lanjut jika tidak ada pemimpin, Ali akhirnya setuju dan disumpah di masjid (Asiva Noor Rachmayani, 2015).

Pemberontakan yang diorganisir oleh Muawiyah, yang menuduh Ali terlibat dalam pembunuhan Utsman, merupakan salah satu dari banyak kesulitan yang harus dihadapi oleh kepemimpinan Ali. Muawiyah memicu pemberontakan dan mendirikan pemerintahan alternatif di Damaskus. Ali menghadapi tantangan dari kelompok yang mempertanyakan kebijakannya dan menuntut hukuman bagi para pembunuh Utsman, sehingga menunda kesetiaan mereka. Ali menghadapi dua perang besar, yaitu Perang Jamal melawan Aisyah, Thalbah, dan Zubair, serta Perang Shiffin melawan Muawiyah. Dalam Perang Jamal, Ali menang, tetapi memilih mengirim Aisyah kembali ke Madinah untuk menghindari pertumpahan darah lebih lanjut. Sementara itu, dalam Perang Shiffin, Muawiyah menggunakan taktik mengangkat al-Qur'an untuk memaksa perdamaian. Perundingan melalui tahkim justru membuat posisi Ali melemah, dengan Amr bin Ash berhasil memanipulasi hasil untuk mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Keputusan tahkim memicu kekecewaan sebagian pendukung Ali, yang kemudian membentuk kelompok Khawarij. Kelompok ini menganggap Ali, Muawiyah, dan para pendukung mereka kafir. Konflik ini memuncak hingga Ali terbunuh oleh seorang anggota Khawarij, Abdurrahman bin Muljam, pada tahun 41 H/661 M. Setelah kematian Ali, putranya, Hasan, menggantikan posisi sebagai khalifah. Namun, tekanan dari Muawiyah dan demi menjaga perdamaian, Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Tahun itu dikenal sebagai Tahun Rekonsiliasi yang menandai akhir konflik besar (Hamzani, A. I., & Aravik, 2021).

## **SIMPULAN**

Meskipun periode pemerintahan khulafa' ar-rasyidin diakhiri dengan pengalaman sejarah yang kurang baik, para khalifah berhasil menerapkan prinsip-prinsip politik Islam dengan efektif. Contohnya, prinsip musyawarah, kebebasan, kesetaraan di depan hukum, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Pada masa itu, meskipun teori politik masih belum matang, cara untuk mengganti khalifah juga berkembang. Abu Bakar menunjuk Umar lewat wasiat, Umar memilih Utsman melalui tim formatur, dan Utsman mengangkat Ali dengan aklamasi. Akhirnya, kekuasaan Islam berpindah ke Muawiyah, yang menandai awal sistem monarki dalam pemerintahan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adolph, R. (2016). Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fikih Siyasah.  
Amirulkamar, S., & Januar, E. (n.d.). Politik dan Pemerintahan Islam.  
Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2021). Politik Islam Sejarah dan Pemikiran.  
Murod, M. (2021). Buku Politik. In Repository.Umj.Ac.Id.  
Rachmayani, A. N. (2015). Politik Islam.

- Rofi, A., & Barmin, R. (n.d.). PERADABAN ISLAM PADA MASA KHULAFUR RASYIDIN  
Oleh: Muhammad Fakhru Muharrom Abdul Rofi' Rifqi Barmin Adam Surya Saputra  
(Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya) Abstrak.
- Sirojuddin. (2020). Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik Dan Gagasan.
- Syahrin, M. A., & Alizon, J. (2020). KONSEP NEGARA DALAM POLITIK ISLAM DI ERA  
MODERN. 20(1), 120–138.